



Kritik Ibn Khaldun terhadap Budaya dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' dalam Muqaddimah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Matin Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 232631111.matin@uinbanten.ac.id</p> <p>Masykur Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masykur@uinbanten.ac.id</p> <p>Iffan Ahmad Gufron Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten iffan.agufron@uinbanten.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Matin., Masykur., & Gufron, I. A. (2025). Kritik Ibn Khaldun terhadap Budaya dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' dalam Muqaddimah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1043 -1049.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep *ashabiyyah* dalam pemikiran Ibn Khaldun sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, dengan fokus pada hubungan antara solidaritas sosial, budaya, dan kekuasaan. Dalam kerangka filsafat politik Islam klasik, *ashabiyyah* dipahami sebagai kekuatan kolektif yang menjadi fondasi pembentukan dan keberlangsungan kekuasaan politik serta stabilitas budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan studi kasus lokal di Provinsi Banten, dengan menyoroti keluarga besar H. Chasan Shohib sebagai representasi aktualisasi *ashabiyyah* dalam konteks kekuasaan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa *ashabiyyah* yang bersifat inklusif dan etis dapat menjadi sumber kekuatan sosial-politik yang stabil dan berkeadilan, sementara *ashabiyyah* yang eksklusif dan tidak adaptif cenderung mendorong disintegrasi dan kemunduran kekuasaan. Temuan ini menegaskan relevansi pemikiran Ibn Khaldun dalam membaca dinamika kekuasaan modern, serta pentingnya revitalisasi nilai solidaritas sosial berbasis budaya dan moralitas untuk membangun kekuasaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ibn Khaldun, Ashabiyyah, Budaya, Kekuasaan, Filsafat Politik Islam, Banten

Abstract

This article examines the concept of *ashabiyyah* in the thought of Ibn Khaldun as outlined in his seminal work, *Muqaddimah*, focusing on the interconnection between social solidarity, culture, and political power. Within the framework of classical Islamic political philosophy, *ashabiyyah* is understood as a collective force that underpins the rise, sustainability, and decline of political authority and cultural cohesion. This study employs a qualitative approach through library research and a contextual case study in Banten Province, Indonesia, highlighting the extended family of H. Chasan Shohib as a modern manifestation of *ashabiyyah* in local political dynamics. The findings reveal that inclusive and ethical *ashabiyyah* can serve as a stabilizing and just sociopolitical force, whereas exclusive and rigid *ashabiyyah* may lead to disintegration and political decline. This study affirms the contemporary relevance of Ibn Khaldun's thought in analyzing modern power structures and emphasizes the need to revitalize social solidarity rooted in cultural values and moral integrity to sustain effective governance.

Keywords: Ibn Khaldun, Ashabiyyah, Culture, Power, Islamic Political Philosophy, Banten

A. Pendahuluan

Ibn Khaldun (abad ke 13) dikenal sebagai salah satu pemikir besar dalam sejarah intelektual Islam yang memberikan fondasi penting bagi lahirnya ilmu sosiologi dan historiografi. (Adnan 2020) Melalui karya utamanya, *Muqaddimah*, ia merumuskan konsep *ashabiyyah*, yaitu solidaritas sosial kelompok yang menjadi dasar kekuasaan politik dan pembangunan peradaban. (Ibnu Khaldun (Masturi Irham, Malik Supat, Abidun Zuhri) 2001) Dalam pemikiran Ibn Khaldun, kekuatan sebuah pemerintahan tidak terletak semata pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi lebih dalam pada kekuatan kolektifitas sosial yang ditopang oleh nilai, identitas, dan moralitas bersama. Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan dan budaya bersifat erat dan siklikal, di mana kekuasaan akan bangkit dan jatuh sesuai dengan naik-turunnya solidaritas sosial dalam masyarakat. (Efendi 2024)

Secara literatur, konsep *ashabiyyah* telah banyak dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam konteks filsafat politik Islam, sosiologi, maupun sejarah peradaban. Para pemikir seperti (Efendi 2024), (Saumantri dan Abdillah 2020), serta (Sholihah dan Yumitro 2022) telah mengeksplorasi relevansi pemikiran Ibn Khaldun terhadap dinamika politik identitas dan perubahan sosial. Namun, sebagian besar kajian ini masih bersifat teoritis atau tekstual, dan belum banyak yang mengaitkannya secara spesifik dengan realitas lokal di wilayah-wilayah Muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya deskriptif terhadap konsep *ashabiyyah*, tetapi juga analitis terhadap implikasi praktisnya dalam kehidupan sosial-politik saat ini.

Kesenjangan penelitian (*gap of problem*) yang menjadi perhatian utama dalam tulisan ini adalah kurangnya kajian yang menghubungkan *ashabiyyah* dengan dinamika kekuasaan dan budaya secara kontekstual—terutama dalam kerangka masyarakat Indonesia yang multikultural dan kompleks. Meski politik identitas telah menjadi wacana dominan, belum banyak upaya untuk menjelaskan bagaimana solidaritas sosial terbentuk, bertransformasi, dan bahkan terkikis dalam dinamika kekuasaan daerah. Padahal, seperti dijelaskan Ibn Khaldun, kekuasaan yang kehilangan akar solidaritasnya akan mengalami kemunduran moral dan kelemahan structural.

Artikel ini menawarkan pendekatan baru (*novelty*) dengan mengintegrasikan analisis konsep *ashabiyyah* Ibn Khaldun dalam konteks lokal, yakni Provinsi Banten, dengan menyoroti eksistensi keluarga besar H. Chasan Shohib sebagai salah satu figur sentral dalam jaringan kekuasaan dan pengaruh sosial di wilayah tersebut. (Atut 2020) Dinasti H. Chasan Shohib, melalui jaringan bisnis, politik, dan sosial-keagamaan, telah membentuk solidaritas kekerabatan dan pengaruh yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana *ashabiyyah* dalam bentuk modern—berbasis keluarga besar, ekonomi patronase, dan religiusitas simbolik—berfungsi sebagai kekuatan pengikat dan sekaligus alat reproduksi kekuasaan di ranah lokal.

Dengan mengangkat studi kasus dari keluarga H. Chasan Shohib, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana kekuatan budaya dan

struktur solidaritas sosial memengaruhi arah kekuasaan yang terjadi di tingkat masyarakat.(Atut 2020) Kajian ini tidak hanya relevan dalam studi filsafat politik Islam, tetapi juga memperkaya diskursus tentang nasionalisme lokal, integrasi sosial, dan konsolidasi kekuasaan dalam konteks Indonesia modern. Pemikiran Ibn Khaldun digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dinamika lokal secara kritis dan mendalam, termasuk relasi antara keturunan, kapital sosial, dan legitimasi kultural dalam membangun dinasti kekuasaan.(Saumantri dan Abdillah 2020)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *ashabiyyah* menurut Ibn Khaldun dan menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks kekuasaan dan budaya di Banten melalui studi kasus keluarga besar H. Chasan Shohib. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan studi kasus, dengan fokus pada teks *Muqaddimah* dan realitas sosial-politik lokal. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan membangun pemahaman yang lebih integratif antara warisan intelektual Islam klasik dan tantangan kekuasaan kontemporer, serta menegaskan pentingnya solidaritas sosial yang adil, inklusif, dan berakar pada nilai budaya dalam membangun struktur kekuasaan yang berkelanjutan.(Sholihah dan Yumitro 2022)

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan studi kasus kontekstual, guna menganalisis konsep *ashabiyyah* dalam pemikiran Ibn Khaldun serta implikasinya terhadap dinamika budaya dan kekuasaan di Provinsi Banten. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri pemikiran Ibn Khaldun sebagaimana tertuang dalam *Muqaddimah*, serta mengaitkannya dengan realitas sosial-politik kontemporer melalui studi kasus keluarga besar H. Chasan Shohib, yang dikenal sebagai salah satu dinasti sosial-politik berpengaruh di wilayah tersebut.

Data primer dalam penelitian ini adalah teks *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun (edisi terjemahan Pustaka Al-Kautsar, 2001) yang dianalisis secara mendalam menggunakan analisis tematik dan analisis teks. Data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen yang relevan mengenai pemikiran Ibn Khaldun, dinamika *ashabiyyah*, serta struktur kekuasaan dan budaya di Banten. Penulis juga merujuk pada literatur kontemporer yang membahas hubungan antara politik identitas, solidaritas sosial, dan kekuasaan dalam konteks Islam dan Indonesia modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, bernama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Khaldun, lahir pada 1 Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M) di kota Tunis, Afrika Utara. Beliau berasal dari keluarga terpelajar yang memiliki akar keturunan dari Hadhramaut, Yaman, dan telah menetap di Andalusia sebelum akhirnya bermigrasi ke Afrika Utara. Sejak kecil, Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam bidang agama, bahasa Arab, logika, dan filsafat. Kecerdasannya tampak sejak muda, dan Ibnu Khaldun cepat menguasai ilmu-ilmu yang menjadi dasar pemikiran intelektual pada zamannya.(Falah 2018)

Pada masa dewasanya, Ibnu Khaldun aktif dalam dunia politik dan birokrasi di berbagai kerajaan Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Ibnu Khaldun bekerja sebagai sekretaris, diplomat, dan penasihat politik, serta sempat mengalami pasang surut kehidupan akibat intrik politik dan konflik antar penguasa. Pengalaman langsungnya dalam pemerintahan memberinya wawasan mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan kekuasaan, yang kelak menjadi bahan penting dalam karya ilmiahnya.(Erliana dan Normawati 2024)

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah "al-Muqaddimah" atau *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, yang ditulis sebagai pengantar untuk kitab sejarahnya *Kitab al-'Ibar*. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun merumuskan teori-teori sosial yang sangat maju untuk zamannya, seperti konsep *ashabiyyah* (solidaritas kelompok), siklus naik-turun dinasti, serta pendekatan ilmiah dalam menulis sejarah. Ibnu Khaldun mengkritik para sejarawan tradisional karena hanya mencatat peristiwa tanpa analisis sebab-akibat yang mendalam. Pendekatannya menjadikan sejarah sebagai ilmu yang sistematis.(Efendi 2024)

Selain sebagai sejarawan dan sosiolog, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai **qadhi** (hakim agung) di Kairo pada masa Dinasti Mamluk. Ibnu Khaldun dikenal sebagai hakim yang adil dan

tegas, meskipun tugasnya sering diwarnai tantangan dari berbagai pihak. Di Kairo pula, Ibnu Khaldun menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan mengajar, menulis, dan menyempurnakan karyanya hingga wafat pada 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406 M). (Roby Jundi Lestari 2023)

Ibnu Khaldun kini dianggap sebagai pelopor sosiologi modern, historiografi, dan ilmu politik. Gagasannya bahkan masih relevan dalam kajian sosial kontemporer. Banyak sarjana modern, baik dari dunia Islam maupun Barat, mengakui kejeniusannya dalam menggabungkan filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. *Muqaddimah* tetap menjadi karya monumental yang membuktikan kebesaran intelektual Islam abad pertengahan yang melampaui zamannya

2. Konsep Ashabiyyah Ibnu Khaldun

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa poin penting dari konsep *ashabiyyah* dalam *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun yang menjelaskan hubungan antara solidaritas kelompok, budaya, dan kekuasaan. Konsep *ashabiyyah* adalah dasar dari pembentukan kekuasaan dalam masyarakat menurut Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa solidaritas yang kuat dalam sebuah kelompok, baik itu berbasis suku, etnis, agama, atau ideologi, adalah faktor utama yang memungkinkan kelompok tersebut untuk meraih kekuasaan dan mendirikan pemerintahan. Ketika solidaritas dalam kelompok ini terjaga dengan baik, mereka mampu menaklukkan kelompok lain dan memperoleh dominasi politik. Namun, seiring berjalannya waktu, *ashabiyyah* ini mulai melemah, baik karena kemewahan, korupsi, atau pengaruh luar, yang menyebabkan keruntuhan dinasti dan perubahan dalam struktur sosial-politik.

Lebih lanjut, Ibn Khaldun mengemukakan bahwa kekuasaan yang dibangun atas dasar *ashabiyyah* tidak dapat bertahan selamanya. Dalam pandangannya, sebuah kelompok yang awalnya memiliki solidaritas yang kuat akan kehilangan kekuatan mereka saat nilai-nilai asli dari solidaritas tersebut mulai terkikis oleh kemewahan dan kemajuan material yang mereka capai. Proses ini, menurut Ibn Khaldun, adalah siklus alami yang terjadi dalam sejarah umat manusia, yang menggambarkan bagaimana sebuah dinasti atau negara dapat jatuh dan digantikan oleh kelompok atau dinasti baru yang lebih kuat dalam hal solidaritas sosial. (Ibnu Khaldun (Masturi Irham, Malik Supat, Abidun Zuhri) 2001)

Dalam konteks budaya, *ashabiyyah* memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebudayaan suatu masyarakat. Ketika solidaritas kelompok itu kuat, budaya yang berkembang cenderung stabil dan konsisten dengan nilai-nilai dasar yang ada. Namun, seiring dengan kemunduran solidaritas, budaya tersebut juga akan mengalami disintegrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur kekuasaan yang dibangun di atasnya. Ibn Khaldun mengkritik kemerosotan ini sebagai tanda dari hilangnya "keaslian" dalam kekuasaan dan budaya, yang sering kali disertai dengan ketidakmampuan untuk mempertahankan keharmonisan sosial. (Saumantri dan Abdillah 2020)

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa konsep *ashabiyyah* tetap relevan dalam menjelaskan dinamika kekuasaan dalam konteks sosial-politik kontemporer. Di negara-negara modern, fenomena *ashabiyyah* dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti politik identitas, kelompok etnis, atau ideologi yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Misalnya, dalam konteks Indonesia, solidaritas yang dibangun berdasarkan agama, suku, atau kelompok tertentu sering kali memainkan peran penting dalam politik identitas dan pemilihan umum, di mana solidaritas ini menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan politik atau sosial. (Sholihah dan Yumitro 2022)

Meskipun *ashabiyyah* menjelaskan dinamika hubungan kekuasaan, penting untuk dicatat bahwa Ibn Khaldun juga menyarankan adanya keterbukaan dan kemajuan dalam membangun struktur sosial. Oleh karena itu, meskipun *ashabiyyah* menjadi faktor penting dalam membentuk kekuasaan, ketahanan suatu pemerintahan juga bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memperbaharui nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan relevansi konsep Ibn Khaldun dalam memahami hubungan antara budaya, kekuasaan, dan perubahan sosial pada zaman modern. (Sholihah dan Yumitro 2022)

3. Transformasi Konsep Ashabiyyah Ibn Khaldun dalam Konteks Kekuasaan dan Budaya Kontemporer

Konsep *ashabiyyah* yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun merupakan salah satu pilar utama dalam teori peradaban Islam klasik. Dalam *Muqaddimah*, *ashabiyyah* didefinisikan sebagai solidaritas sosial yang mengikat kelompok manusia dalam satu kesatuan sosial-politik yang kuat. Solidaritas ini tidak hanya menjadi fondasi bagi pembentukan kekuasaan, tetapi juga menjadi indikator keberlangsungan atau keruntuhan suatu peradaban. (Ibnu Khaldun (Masturi Irham, Malik Supat, Abidun Zuhri) 2001) Relevansi konsep ini dalam dunia kontemporer

membuka ruang untuk menafsirkan dinamika kekuasaan berdasarkan struktur sosial dan kekerabatan yang masih hidup di masyarakat modern.

Ibn Khaldun membagi perkembangan dinasti dan kekuasaan dalam beberapa fase, yakni fase pembentukan yang ditopang oleh solidaritas yang kuat, fase konsolidasi kekuasaan, fase kemakmuran, dan akhirnya fase kemunduran yang disebabkan oleh melemahnya *ashabiyyah*.(Fajar 2019) Dalam hal ini, kekuasaan tidak dipahami semata sebagai kekuatan struktural atau administratif, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang bergantung pada kohesi internal suatu kelompok. Hal ini menegaskan bahwa kunci kekuasaan yang stabil dan berkelanjutan adalah keberadaan solidaritas kolektif yang tumbuh secara alami dan bermakna dalam relasi sosial.(Fajar 2019)

Dalam konteks kontemporer, *ashabiyyah* tidak lagi terbatas pada ikatan kesukuan atau nasab, tetapi dapat merujuk pada bentuk solidaritas berbasis agama, ideologi, bahkan jaringan ekonomi. Di Indonesia, bentuk-bentuk solidaritas ini kerap terlihat dalam praktik politik identitas, perebutan kekuasaan lokal, dan dinamika sosial yang melibatkan kelompok-kelompok dominan (Sholihah dan Yumitro 2022). Dalam studi ini, perhatian diarahkan pada fenomena kekuasaan lokal di Provinsi Banten, khususnya pada keluarga besar H. Chasan Shohib yang selama beberapa dekade terakhir memainkan peran penting dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.

Keluarga besar H. Chasan Shohib merupakan salah satu contoh konkret *ashabiyyah* dalam bentuk modern. Ikatan kekerabatan, warisan pengaruh bisnis, jaringan keagamaan, serta afiliasi politik telah membentuk kekuatan yang tidak hanya berfungsi dalam skala keluarga, tetapi juga meluas ke tingkat pemerintahan daerah. Seperti dijelaskan oleh (Yulianto dan Syauqillah 2019), *ashabiyyah* dalam konteks masyarakat modern dapat bertransformasi menjadi kekuatan hegemonik jika tidak diimbangi dengan nilai keadilan dan keterbukaan terhadap kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang berbasis pada solidaritas keluarga atau kelompok memiliki potensi untuk menguatkan atau melemahkan tatanan demokrasi tergantung pada cara ia dijalankan.

Dalam perspektif Ibn Khaldun, kemunduran suatu kekuasaan sering kali disebabkan oleh degradasi nilai *ashabiyyah*. Ketika generasi penerus tidak lagi memelihara semangat kolektif, dan justru terjebak dalam kemewahan, korupsi, serta individualisme, maka solidaritas sosial yang menopang kekuasaan perlahan melemah.(Efendi 2024) Dalam konteks Banten, tantangan serupa juga dapat diamati, ketika loyalitas terhadap struktur kekuasaan lokal mulai bergeser menjadi praktik politik pragmatis dan personalisme, yang jauh dari semangat kolektif yang membentuknya sejak awal.

Salah satu risiko yang muncul dari *ashabiyyah* dalam bentuk eksklusif adalah terjadinya pembelahan sosial dan marginalisasi kelompok luar. Solidaritas internal yang terlalu kuat tanpa jembatan integratif terhadap masyarakat luas dapat menimbulkan resistensi dan konflik horizontal. Ibn Khaldun sendiri telah memperingatkan bahaya fanatisme kelompok yang dapat menghancurkan kohesi sosial yang lebih luas.(Saumantri dan Abdillah 2020) Oleh karena itu, *ashabiyyah* yang sehat seharusnya tidak hanya mengikat ke dalam, tetapi juga terbuka untuk membangun keadilan sosial bagi semua pihak di luar kelompok inti.

Di sisi lain, jika dikelola secara etis dan inklusif, *ashabiyyah* dapat menjadi kekuatan positif untuk memperkuat integrasi sosial, mempertahankan nilai-nilai budaya, dan membangun tata kelola yang stabil. Dalam hal ini, warisan solidaritas yang dimiliki oleh keluarga besar H. Chasan Shohib dapat dimaknai sebagai bentuk modal sosial yang memungkinkan terbentuknya relasi kekuasaan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Studi oleh (Fauzan Montanah, Zahira Gefira, dan Kurniati Kurniati 2024) menunjukkan bahwa kekuasaan lokal yang dibangun atas nilai budaya dan religiusitas yang kuat cenderung memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Lebih lanjut, pendekatan Ibn Khaldun terhadap kekuasaan selalu mengaitkan aspek budaya, moralitas, dan spiritualitas. Dengan demikian, kekuasaan bukan sekadar hasil kalkulasi politik, tetapi merupakan refleksi dari struktur sosial yang hidup. Dalam kerangka ini, budaya Banten yang kaya akan nilai keislaman dan tradisi lokal menjadi elemen penting dalam mempertahankan solidaritas sosial berbasis nilai. Ketika nilai-nilai tersebut dikekalkan dan disesuaikan dengan tantangan zaman, maka kekuasaan akan memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap tekanan modernitas dan globalisasi.(Mulasi, Walidin, dan Silahuddin 2023)

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *ashabiyyah* dalam konteks modern harus dimaknai secara dinamis. Ia bukan lagi sekadar ikatan primordial, tetapi harus diarahkan menjadi kekuatan integratif yang mendukung keadilan, partisipasi, dan stabilitas sosial-politik. Pemikiran Ibn Khaldun memberikan kerangka kritis untuk mengevaluasi kekuasaan lokal agar

tidak terjebak dalam siklus kemunduran yang lahir dari eksklusivitas dan dekadensi moral. Studi ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai *ashabiyyah* yang inklusif dan etis merupakan kunci penting bagi masa depan kekuasaan yang berkeadilan.

D. Kesimpulan

Konsep *ashabiyyah* yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara solidaritas sosial, budaya, dan kekuasaan. *Ashabiyyah* tidak hanya menjadi dasar munculnya kekuasaan politik, tetapi juga berperan dalam menjaga kestabilan budaya dan keberlangsungan peradaban. Ketika solidaritas ini melemah akibat kemewahan, korupsi, atau perpecahan internal, maka kekuasaan dan budaya pun ikut mengalami kemunduran. Pola siklus kekuasaan yang digambarkan Ibn Khaldun memperlihatkan bahwa kekuatan politik sangat bergantung pada kualitas kohesi sosial suatu kelompok.

Dalam konteks kekuasaan lokal di Provinsi Banten, studi kasus keluarga besar H. Chasan Shohib memperlihatkan aktualisasi modern dari *ashabiyyah* dalam bentuk jaringan kekeluargaan, ekonomi, dan spiritual yang mampu memengaruhi dinamika sosial-politik. Dinasti ini membuktikan bahwa kekuatan simbolik dan struktural yang berakar pada solidaritas internal dapat membentuk basis kekuasaan yang kuat. Namun demikian, risiko *ashabiyyah* eksklusif tetap mengancam, khususnya ketika nilai-nilai kolektif mulai bergeser menjadi kepentingan pragmatis. Dalam hal ini, pemikiran Ibn Khaldun memberi peringatan penting akan bahaya disintegrasi jika solidaritas tidak diiringi oleh nilai keadilan dan inklusivitas.

Oleh karena itu, *ashabiyyah* dalam masyarakat modern perlu direvitalisasi sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya bersifat mengikat ke dalam, tetapi juga menjembatani keragaman masyarakat luas. Solidaritas yang etis dan terbuka dapat menjadi fondasi bagi kekuasaan yang adil dan berkelanjutan. Pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya relevan untuk memahami sejarah peradaban, tetapi juga sebagai kerangka kritis dalam membaca tantangan kekuasaan kontemporer, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan budaya, identitas sosial, dan struktur kekuasaan di tengah arus globalisasi dan fragmentasi politik.

E. Referensi

- Adnan, Gunawan. 2020. *SOSIOLOGI AGAMA: MEMAHAMI TEORI DAN PENDEKATAN*. Ar-raniry Press.
- Atut, Ratu. 2020. "Dinasti politik, familisme, strategi politik, partisipasi politik, Banten" 10 (2).
- Efendi, Zulfan. 2024. "Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern." *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 6:2198–2210.
- Erliana, Leni, dan Yeni Irma Normawati. 2024. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5 (1): 129–45. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1308>.
- Fajar, Abbas Sofwan Matlail. 2019. "Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6 (1): 1–12. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10460>.
- Falah, Ahmad. 2018. "KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT IBNU KHALDUN (Studi Atas Kitab Muqaddimah)." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 2 (1): 83. <https://doi.org/10.21043/thufula.v2i1.4267>.
- Fauzan Montanah, Zahira Gefira, dan Kurniati Kurniati. 2024. "Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2 (3): 316–29. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1346>.
- Ibnu Khaldun (Masturi Irham, Malik Supat, Abidun Zuhri). 2001. *Mukaddimah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mulasi, Syibrani, Warul Walidin, dan Silahuddin Silahuddin. 2023. "KONSEP SOSIOLOGIS DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF IBN KHALDUN: SUATU ANALISIS PSIKOPEDAGOGIK." *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, Desember, 207–19. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.2323>.
- roby jundi lestari. 2023. *READING IBNU KHALDUNS THOUGHTS MEMBACA*. CV. Adanu Abimata.
- Saumantri, Theguh, dan Abdillah Abdillah. 2020. "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8 (1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326>.
- Sholihah, Nurur Rahmah Nia, dan Gonda Yumitro. 2022. "RELEVANSI KONSEP ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP ISU EKONOMI POLITIK DI YORDANIA" 18 (2).

Yulianto, Nawan, dan Muhamad Syauqillah. 2019. "Aşabiyyah dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibn Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik dan Tribalisme di Timur Tengah" 6 (1).